



dalam organisasi SDI (Sarekat Dagang Islam), didirikan di Sala pada tahun 1911<sup>3</sup> oleh H. Samanhuri, seorang pengusaha dan pedagang batik yang berhasil mendirikan cabang-cabang perusahaannya di Surabaya, Banyuwangi, Tulungagung, Bandung dan Tarakan bersama dengan partner dagangnya. Sebelumnya Samanhuri bersama dengan saudara-saudara, teman dan pengikutnya yang terdiri dari pengusaha batik di kampung Lawean dan pegawai rendah Kasunanan Surakarta, telah membentuk perkumpulan lokal, *Rekso-rumekso* (dalam bahasa Jawa, rekso-rumekso secara harfiah berarti saling menjaga). Sebagai perkumpulan ronda, rekso-rumekso bertujuan untuk menjaga keamanan dari ulah penjahat yang banyak melakukan pencurian di Lawean dan kota Sala. Akan tetapi dalam realitasnya, rekso-rumekso lebih merupakan tandingan perkumpulan *Kong Sing* yang didirikan pada tahun 1911 dengan beranggotakan orang-

---

<sup>3</sup>Menurut Salichin Salam, SDI lahir pada tanggal 16 Oktober 1905 dibawah kepeloporan H. Samanhuri di Sala, hal ini senada dengan pengakuan Samanhuri sendiri. Sedangkan Dr. Mohammad Hatta mengatakan SDI lahir di Jakarta pada tahun 1909 dengan pendirinya Raden Mas Tirta Adisuryo, kemudian pada tahun 1911 didirikan pula di Bogor, baru pada tanggal 10 September 1912 SI didirikan di Sala berdasarkan Akte Notaris pemerintah Belanda. lihat Drs. M.A. Gani, MA., *Cita Dasar Dan Pola Perjuangan Syarikat Islam*, Cetakan Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hlm. 6-10.





sebagaimana yang terjadi pada bulan Agustus 1912, pecah peristiwa pemogokan buruh pertama yang mengindikasikan kebangkitan semangat dan kesadaran bangsa Indonesia terhadap derajat kemanusiaannya. Pemogokan dilakukan oleh buruh perkebunan Krepyak milik Belanda, dan SI dituding sebagai biang keladinya, sehingga kegiatannya dibekukan oleh Residen Sala. Sejak saat itu SI semakin menunjukkan sikap menentang kapitalisme dan kesewenang-wenangan.<sup>10</sup>

Dalam kongres SI di Yogyakarta yang berlangsung tanggal 18-20 April 1914, HOS Tjokroaminoto terpilih sebagai ketua Central Comite organisasi itu. Ia diharapkan dapat mengemudikan organisasi tersebut melalui tahun-tahun permulaan yang sukar. Tjokroaminoto menyusun anggaran dasar baru bagi organisasi SI bagi seluruh Indonesia serta minta pengakuan dari pemerintah. Akan tetapi pemerintah Hindia Belanda menolaknya dengan berbagai alasan. Sedangkan untuk cabang-cabang SI lokal pada umumnya diberi pengakuan pemerintah. Tentu saja kebijakan pemerintah tersebut mengganggu struktur organisasi SI. Sebagai jalan keluar, dalam suatu pertemuan di Yogyakarta pada tanggal 18 Februari 1914 pemimpin-

---

<sup>10</sup> *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 16, PT Cipta Adipustaka, Jakarta, 1991, hlm. 363.



Dalam Kongres Nasional pertama tersebut, sebagai ketua CSI (Central Sarekat Islam), ia diamanati untuk merancang kedudukan semacam DPR di tingkat pusat sampai daerah. Selanjutnya dalam Kongres Nasional kedua di Jakarta (20-27 Oktober 1917), diambil keputusan, bahwa SI masih menyetujui aksi parlementer yang evolusioner dan masih tetap mencita-citakan suatu pemerintahan Nasional Indonesia sendiri.<sup>12</sup>

Untuk mengantisipasi perkembangan politik saat itu, pemerintah Hindia Belanda membentuk Dewan Rakyat (Volksraad), yang diresmikan Gubernur Jenderal Mr. Graaf van Limburg Stirum (18 Mei 1918). Tjokro dan Abdul Muis, dua orang tokoh SI, menjadi anggota Dewan itu. Keduanya bertekad mengubahnya menjadi Parlemen sejati yang anggotanya dipilih dari dan oleh rakyat. Mosi Tjokro yang berisi tuntutan agar parlemen dipilih dari dan oleh rakyat dan pembentukan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Parlemen, dicetuskan pada tanggal 25 Nopember 1918, namun ditolak pemerintah Hindia Belanda. Kegagalan ini menyebabkan SI lewat kongres di Yogyakarta (1925) mengambil sikap nonkooperasi dengan pemerintah Hindia Belanda. Dalam kongres SI 17-20 Pebruari 1923 di Madiun, nama SI

---

<sup>12</sup>Lathrop Stoddard, *Pasang Naik Kulit Berwarna*, t.p., Jakarta, 1966, hlm. 291-292.









diketuai oleh Wahudum Wondoamiseno, Mansur sebagai bendahara dan Abdul Wahab sebagai penasehat. Dalam perkembangan selanjutnya, Majelis Islam Luhur diubah menjadi Majelis Islam 'Ala Indonesia (MIAI), mengingat sebelumnya juga sudah ada Majelis Islam 'Ala Turkiyah, Iroqiyah, Hindia dan lain-lain di negara Islam. Selain itu juga diusahakan agar organisasi Islam yang belum masuk, untuk menjadi anggotanya pula.<sup>21</sup>

Adapun tujuan didirikannya MIAI adalah untuk mempererat hubungan antara organisasi-organisasi Islam dengan umat Islam di luar Indonesia dan mempersatukan suara-suara untuk membela keluhuran Islam. Inisiatif kearah persatuan dan saling pengertian ini didorong oleh dua kenyataan. Pertama, usaha-usaha politik yang bercorak Islam pada waktu itu masih berserakan, oleh karena itu, persatuan sangat diperlukan dalam kerangka melawan penjajah. Adanya friksi-friksi dibidang politik dan perbedaan-perbedaan faham dalam soal *khilafiyah* dikalangan umat perlu dibenahi atas dasar semangat persaudaraan dalam MIAI. Kedua, adanya contoh-contoh yang kompetitif dari golongan sekuler yang berusaha mempersatukan diri. Kenyataan ini semakin mendorong pemimpin Islam untuk menatap posisi

<sup>21</sup>Soebagijo I.N., *KH. Mas Mansur Pembaharu Islam di Indonesia*, Cet.1, PT Gunung Agung, Jakarta, 1981, hlm. 31-32.









dalam waktu relatif singkat menyerah pada 8 Maret 1942, tanpa mampu memberikan perlawanan berarti. Di bawah Panglima Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, penandatanganan itu dilakukan lapangan terbang militer Belanda di Kalijati.

Pada awal kedatangan Jepang, timbul simpati dan harapan baru bangsa Indonesia. Bahkan para nasionalis Indonesia yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda bersikap nonkooperasi, bersedia bekerja sama dengan pihak Jepang. Hal ini berkat propaganda tentara Jepang yang sangat intensif, apalagi dalam siaran radio Tokyo selalu mendengungkan, bahwa tujuan Perang Pasifik adalah mengusir orang-orang kulit putih dari bumi Asia. Selain itu, sebelumnya Jepang juga banyak melakukan aktivitas internasional untuk menarik bangsa-bangsa yang beragama Islam dan meniupkan slogan anti Barat.<sup>28</sup> Sambutan yang baik dari penduduk Indonesia ini dilatari oleh beberapa faktor, antara lain adanya ramalan *Joyoboyo* yang hidup dikalangan rakyat. Sedangkan faktor eksternal adalah kemenangan Jepang atas Rusia dipandang sebagai kemenangan Asia

---

<sup>28</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit: Islam di Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1980, hlm. 135.







Shumubu yang dibentuk Jepang ini memiliki akses langsung kepada kiai pedesaan tanpa melalui pamong praja pribumi, dan bahkan pengurus MIAI. Kantor ini menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi para kiai dengan mengajarkan sejarah, kewarganegaraan dan bahasa Jepang. Tindakan Jepang ini membawa kiai dalam arus politik yang berlangsung cepat.<sup>37</sup>

Kantor Urusan Agama tersebut merupakan pranata pemerintah pertama yang dipercayakan pihak Jepang kepada orang Indonesia, Hoesein Djajadiningrat yang diangkat sebagai kepala lembaga tersebut menggantikan Kolonel Horie, orang Jepang. Pada tanggal 1 Agustus 1944, KH. Hasyim Asyari, pimpinan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang Jawa timur, diangkat memangku jabatan tersebut, yang waktu itu beliau juga menjabat sebagai ketua Masyumi.<sup>38</sup>

Duduknya KH. Hasyim Asyari pada posisi sentral *Shumubu*, mempunyai arti yang sangat besar bagi Jepang dan umat Islam. Bagi Jepang, dapat diartikan sebagai suatu bentuk kebijakan yang realistis dalam rangka *domestikasi* umat Islam. Sedangkan bagi umat Islam

<sup>37</sup> Mohammad Fajrul Falakh, *Jam'iyah Nahdlatul Ulama: Kini, Lampau dan Akan Datang*, dalam Elyasa KH. Dharwis (ed.), *NU, Gus Dur dan Masyarakat Sipil*, Cet.1, LKiS, Yogyakarta, 1994, hlm. 181.

<sup>38</sup> Zaini Muchtarom, *op. cit.*, hlm. 43.











menjelaskan secara terperinci tentang Pancasila sebagai dasar yang setepat-tepatnya bagi negara Indonesia merdeka. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan Nasionalisme Indonesia sebagai prinsip pertama. Agar tidak merosot menjadi *chauvinisme*,<sup>51</sup> maka diusulkannya internasionalisme atau kemanusiaan sebagai prinsip kedua. Demokrasi merupakan prinsip ketiga. Soekarno menolak gagasan bahwa Islam akan menjadi dasar negara Indonesia. Sebab menurutnya, Islam tidak benar-benar dihayati penduduk Indonesia. Indikasi ini dapat dilihat bahwa wakil-wakil rakyat yang menghendaki konstitusi Islam tidak mencapai 60%-90%. Selanjutnya ia mengemukakan prinsip berikutnya yaitu demokrasi. Sampai demokrasi saja dengan sendirinya tidak cukup, oleh karena itu, yang menjadi landasan negara selanjutnya ialah keadilan sosial atau kemakmuran. Tidak boleh ada kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka. Sebagai prinsip terakhir ialah ketuhanan. Rakyat Indonesia harus menjadi bangsa yang religius, menyembah Tuhannya masing-masing dan harus menghormati

---

<sup>51</sup>Chauvinisme merupakan aliran pemikiran yang memberikan tekanan secara berlebihan terhadap cinta tanah air. Aliran ini berasal dari Nicolas Chauvin, seorang prajurit Napoleon yang terlalu memuliakan kesadaran nasional dan mengembangkan kebencian terhadap bangsa lain. lihat Drs Ali Mudhofir, *Kamus Teori Dan Aliran Dalam Filsafat*, Cet.1, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 13.







dan untuk meneliti masalah keuangan dan ekonomi. Sementara itu, panitia perancang UUD diketuai oleh Ir. Soekarno dengan anggota lainnya A.A. Maramis, Oto Iskandardinata, Poerbojo, H. Agus Salim, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Supomo, Ny. Maria Ulfah Santoso, KH. Wachid Hasyim, Parada Harahap, Mr. Latuharhary, Mr. Susanto Tirtoprodjo, Mr. Sartono, Mr. Wongso Negoro, Mr. Wuryaningrat, Mr. R.P. Singgih, Tan Eng Hoa, Husein Djajadiningrat dan dr. Sukiman Wiryoanjojo.<sup>58</sup> Panitia yang menyusun konstitusi panitia tersebut membicarakan antara lain pembukaan undang-undang dasar, bentuk negara, pimpinan negara dan warga negara.

Dalam kaitannya dengan pembukaan undang-undang dasar, anak kalimat kontroversial sesudah kalimat ketuhanan -dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya- mengandung berbagai reaksi. Mula-mula Latuharhary, Wongsonegoro dan Djajadiningrat menyatakan tidak menyetujui terhadap disertakannya anak kalimat tersebut dengan alasan kalimat itu memaksa orang-orang Islam untuk melaksanakan syariat agamanya. Tapi H. Agus Salim, KH. Wachid Hasyim dan Ir. Soekarno yang terlibat langsung dalam perumusan

---

<sup>58</sup>Marwati Djoened Foesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *loc. cit.*





Hasil-hasil Badan Penyelidik tersebut akhirnya diserahkan pada Saiko Sikikan, Panglima tertinggi tentara di Jawa.

Meskipun anak kalimat setelah sila ketuhanan tidak mengikat bagi pemeluk agama lain, tetapi menimbulkan perasaan berat bagi mereka yang beragama lain. Kondisi ini nampak sekali sebagaimana dituturkan oleh Hatta:

"Pada sore harinya [tanggal 17 Agustus 1945] aku menerima telepon dari tuan Nishijama, pembantu Admiral Maeda menanyakan dapatkah aku menerima opsir Kaigun (Angkatan Laut) karena ia mau mengemukakan suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Nishijama sendiri akan menjadi juru bahasanya. Aku persilakan mereka datang. Opsir itu yang aku lupa namanya, datang sebagai utusan Kaigun untuk memberitahukan sungguh, bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik, yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang, berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi: 'Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya-pemeluknya.' Mereka mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tapi tercantumnya ketetapan seperti itu didalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar berarti mengadakan *Diskriminasi* terhadap mereka golongan minoritas. Jika 'diskriminasi' itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Aku mengatakan bahwa itu bukan suatu diskriminasi, sebab penetapan itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Waktu merumuskan Undang-Undang Dasar itu, Mr. Maramis yang ikut serta dalam Panitia Sembilan, tidak mempunyai keberatan apa-apa dan pada tanggal 22 Juni ia ikut menanda-tanganinya. Opsir tadi mengatakan bahwa itu adalah pendirian dan perasaan pemimpin-pemimpin Protestan dan Katolik dalam daerah pendudukan Kaigun. mungkin waktu itu Mr. A.A. Maramis cuma memikirkan, bahwa bagian kalimat itu hanya untuk rakyat Islam yang 90% jumlahnya dan tidak mengikat rakyat Indonesia yang beragama lain. Ia tidak merasakan bahwa penetapan itu adalah suatu







sebenarnya pada saat itu lebih merupakan prolog perdebatan dalam Konstituante.

Sepuluh tahun sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan umum yang pertama tahun 1955 sebagai bagian dari keharusan konstitusional di bawah payung Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam pemilihan umum tersebut terkandung dua tujuan. Pertama, memilih anggota parlemen (DPR), dan kedua memilih anggota Konstituante yang bertugas menyusun undang-undang dasar baru, karena undang-undang dasar yang berlaku pada waktu itu masih bersifat sementara.

Dalam catatan sejarah, pemilu tahun 1955 merupakan pemilu paling demokratis yang pernah ada di Indonesia, sehingga memungkinkan munculnya partai-partai yang cukup banyak. Kondisi ini didorong oleh semangat liberalisme dalam dunia politik bangsa Indonesia waktu itu. Menurut A. Syafii Maarif, tidak kurang dari 29 partai politik, golongan dan calon perorangan yang turut menyemarakkan suasana pemilu tersebut.<sup>68</sup> Dalam kondisi tersebut, ternyata tidak ada satu kekuatan politik yang besar dan mayoritas

---

<sup>68</sup>Bahkan menurut Pranarka, pemilu waktu itu diikuti oleh sekitar 40 partai politik. lihat A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, Centre For Strategic And International Studies (CSIS), Jakarta, 1985, hlm. 134.







Mengingat sulitnya mencapai kesepakatan, pada tanggal 2 Maret 1959 Perdana Menteri Djuanda dalam keterangannya kepada Konstituante menyinggung usul pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah berharap agar Konstituante bersedia menerima usul itu, sehingga proses kembali kepada UUD 1945 dapat dituangkan dalam suatu piagam yang disebut *Piagam Bandung*.<sup>75</sup>

Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno berpidato dalam Majelis Konstituante. Dalam pidatonya beliau mengingatkan lagi beberapa permintaan pada saat pelantikan anggota Konstituante tahun 1956, yakni agar anggota Konstituante berperan sebagai penyambung lidah yang setia dari 80-85 juta rakyat Indonesia yang sedang berevolusi. Selanjutnya Presiden juga menyerukan agar Konstituante bersama pemerintah menetapkan UUD Republik Indonesia yang sesuai dengan jiwa, watak dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, dan agar Konstituante tidak dijadikan tempat berdebat bertele-tele dan medan pertempuran bagi partai-partai atau pemimpin-pemimpin politik. Dalam kesempatan itu Presiden Soekarno sekali lagi menegaskan anjurannya

---

<sup>75</sup>Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 13, *op. cit.*, hlm. 218.















